



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA, KOORDINATOR PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA
KEGIATAN ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2025

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2024



KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA, KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA, BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6, 7, 8 , 9 , 10 dan 11 Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Sidoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 04).
8. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 11).
9. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Sidoharjo.
- KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

- KETIGA : Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- KEEMPAT : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas :
- a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KELIMA : Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan disesuaikan/dibetulkan sesuai dengan regulasi yang ada.



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Sidoharjo;
2. Ketua BPD.
3. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KOORDINATOR
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BENDAHARA
DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DESA
SIDOHARJO.

DAPTAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA, BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DESA SIDOHARJO.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	SUMBER DANA
1.	Titik Saptawati, S.Pd, MH	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	
2.	Sugiyanto	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	
3.	Titik Handayani, S.Si	Plt. Kaur Keuangan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	
			1. Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD
			2. Penghasilan Tetap Ke 13 Kepala Desa	ADD
			3. Tunjangan Kepala Desa dari Bengkulu	PAD
			4. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	ADD
			5. Penghasilan Tetap Ke 13 Perangkat Desa	ADD
			4. Tunjangan Perangkat Desa dari Bengkulu	PAD
			5. Tunjangan Plt. Perangkat Desa	PAD
			6. BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa	ADD
			7. BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa	ADD
			8. Tunjangan Kedudukan BPD	ADD
			9. Jaminan BPJS Ketenagakerjaan BPD	ADD
			10. Insentif RT	ADD

			11. Jaminan BPJS Ketenagakerjaan RT	ADD
			12. Operasional RT	PAD
4. Sri Pujiastuti	Kaur Umum dan TU	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)		
		1. Belanja Alat Tulis kantor & Benda Pos (Silpa PAD)		PAD
		2. Belanja Perlengkapan Alat -alat Listrik		PAD
		3. Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		PAD
		4. Belanja Bahan Bakar		PAD
		5. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		PAD
		6. Biaya Konsumsi		PAD
		7. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		PAD
		8. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		PAD
		9. Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan Lelang TKD		PAD
		10. Honorarium Petugas PKPKD & PPKD		ADD
		11. Belanja Jasa Honorarium Staff Administrasi BPD		PAD
		12. Belanja Perjalanan Dinas		PAD
		13. Belanja Jasa Langganan Listrik (Silpa PAD)		PAD
		14. Belanja Jasa Langganan PDAM		PAD
		15. Belanja Jasa Langganan Internet		ADD
		16. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		PAD
		17. Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat		PAD
		18. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		PAD
		19. Belanja Pemeliharaan Peralatan		PAD
		20. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi		PAD
		21. BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan		ADD
		22. Admin Bank		DLL

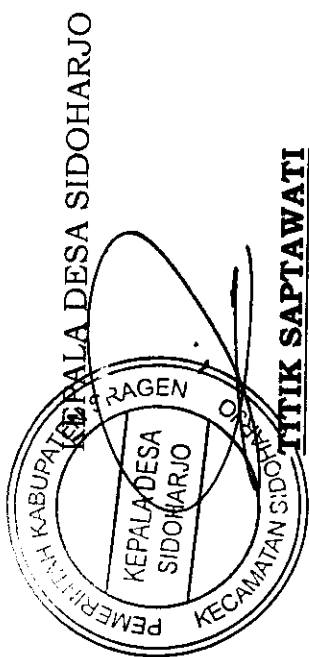
			23. Penyediaan Operasional BPD	PAD
			24. Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	DDS
			25. Bantuan Untuk Korban Bencana	DDS
			26. Pengadaan Laptop (Silpa PBH)	BHP
			27. Pengadaan Korden Pintu Kantor (Silpa PBH)	BHP
			28. Pengadaan Tempat Tidur Penjaga Kantor (Silpa PAD)	PAD
			29. Pengaman AC Kantor BPD (Silpa PAD)	PAD
			30. Pengadaan Kotak Saran (Silpa PAD)	PAD
			31. Pengadaan Meja Rapat Pimpinan	PAD
			31. Pengecatan Gedung Kantor	BHP
			32. Pengecatan Pagar Kantor	BHP
			33. Pengecatan kantor BPD	BHP
			34. Penilaian Aset Desa	ADD
			35. Pengelolaan Administrasi Aset Desa	PAD
5.	Wawan Agus Bawa W, ST	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	
			1. Kegiatan Verval P3KE	DDS
			2. Kegiatan Pendataan SIKS-NG	DDS
			3. Terselenggaranya Musyawarah Desa Perencanaan Desa (RKP Desa)	PAD
			4. Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	PAD
			5. Musyawarah Desa Pembahasan & Penetapan RKP Desa	PAD
			6. Musrenbangdes Khusus Perubahan RKP Desa (Silpa PAD)	PAD
			7. Musyawarah Desa Penetapan Rancangan APB Desa	PAD

			8. Musyawarah Desa Penetapan APB Desa	PAD
			9. Musyawarah Desa Sosialisasi APB Desa (Silpa PAD)	PAD
			10. Musyawarah Desa Perubahan APB Desa	PAD
			11. Musyawarah Desa Realisasi APB Desa Semester Pertama	PAD
			12. Musyawarah Desa Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa (Silpa PAD)	PAD
			13. Penyusunan Dokumen RKP Desa	PAD
			14. Penyusunan Perubahan RPJM Desa (Silpa PAD)	PAD
			15. Penyusunan Realisasi, Rancangan, Penetapan & Perubahan APB Desa	PAD
			16. Penyusunan LPPD, IPPD & LKPPD (Silpa PAD)	PAD
6.	Wawan Agus Bawa W, ST	Plt. Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	
			1. Kegiatan Rehab TK Pertiwi 1 (Silpa DDS)	DDS
			2. Kegiatan Pengecoran Jalan Desa Dukuh Banyuning s.d Dukuh Sidoharjo	DDS
			3. Kegiatan Lanjutan Pengecoran Jalan Desa Dukuh Pungkruk RT 5	DDS
			4. Lanjutan Pengaspalan Jalan Dukuh Sidomulyo RT 2 & 16	DDS
			5. Kegiatan Lanjutan Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Sri Luwih 1	DDS
			6. Kegiatan Rehab Gedung Saptawati (eks. SMP) (Silpa DDS)	DDS
			7. Kegiatan Penanaman Pohon di Tanah Kas Desa	DDS
			8. Operasional Destana	DDS
			9. Pembangunan sumur sawah Sri Luwih 1	DDS
			10. Kegiatan Lanjutan Pembangunan Sumur Sawah Sri Luwih 3 (Silpa DDS)	DDS

		11. Kegiatan Lanjutan Pembangunan Lingkungan Kios Desa Taman Saptawati	DDS
		12. Kegiatan Lanjutan Pembangunan Lingkungan Kios Desa Taman Singodimejo	PAD
		13. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 22 KPM	DDS
		14. Pengaspalan Jalan Plasan RT 14 & 15 Sidoharjo Kab. Sragen	BKK
		15. Pengaspalan Jalan Plasan RT 14 & 15 Sidoharjo Kab. Sragen	BKP
		16. Pengaspalan Jalan Desa Pungkruk RT 5 Sidoharjo Kab. Sragen	BKP
7.	Nanik Rositawati	Kasi Pelayanan	
		Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	
		1. Kegiatan Honor Pengajar TK Pertiwi 1, 2 & 4	DDS
		2. Kegiatan Honor Kader Posyandu ILP	DDS
		3. Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (20 orang)	DDS
		4. Kegiatan PMT Lansia (300 orang)	DDS
		5. Kegiatan PMT Balita (220 anak)	DDS
		6. Kegiatan Insentif Kader Kesehatan (70 orang)	DDS
		7. Kegiatan Posyandu Remaja (300 orang)	DDS
		8. Kegiatan Pemucuan Sanitasi Sehat (STBM)	DDS
		9. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sri luwih 8	DDS
		10. Bantuan Pelaksanaan HUT Tingkat dukuh	PAD
		11. Bantuan Pelaksanaan Keagamaan Tingkat Dukuh	PAD
		12. Pembinaan LPMD	ADD
		13. Pembinaan KPMD	PAD
		14. Honor Pengurus Inti TP PKK	ADD
		15. Operasional PKK	ADD
		16. Operasional PKK	PAD

			17. Pemeliharaan Saluran Tersier Sri Luwih 1 s.d 8	DDS
			18. Kegiatan Penyuluhan Perempuan	DDS
			19. Kegiatan Penyuluhan Perlindungan Anak	DDS
			20. Kegiatan Penguatan Penyandang Difabel	DDS
8.	Titik Handayani, S.Si	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	
			1. Pemutakhiran Profil Desa (Prodeskel)	PAD
			2. Musdesus Penerima BLT (Silpa PAD)	PAD
			3. Musyawarah Dusun & Kelompok	PAD
			4. Musyawarah Desa Rembug Stunting	DDS
			5. Musyawarah Desa Evaluasi Penurunan Stunting	PAD
			6. Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Bumdes	PAD
			7. Musyawarah Desa Sosialisasi Kebijakan Desa	PAD
			8. Penyusunan Perdes, Perkades & SK Kades	PAD
			9. Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)	PAD
			10. Pemutakhiran SDGs Desa	PAD
			11. Pemutakhiran eHDW Desa	PAD
			12. Pemutakhiran Epdeskel Desa	PAD
			13. Pengembangan Website Desa	PAD
			14. Pemilihan Ketua RT	PAD
			15. Pembentukan Pengurus TP PKK, Kader Kesehatan, Kader Posyandu	PAD
			16. Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa	PAD
			17. Pembentukan Pengurus LPMD & KPMD	PAD
			18. Penjarangan Perangkat Desa (Silpa ADD)	ADD
			19. Pelantikan Perangkat Desa (Silpa ADD)	ADD
			20. Mutasi Perangkat Desa (Silpa ADD)	ADD
			21. Pelantikan Mutasi Perangkat Desa (Silpa ADD)	ADD
			22. Biaya Pajak Bumi & Bangunan Desa (Silpa PLL)	PLL

			23. Pengadaan MMT informasi Realisasi, penetapan & Perubahan APB Desa	PAD
			24. Honorarium LINMAS	ADD
			25. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	ADD
			26. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	ADD
			27. Peningkatan Kapasitas BPD	ADD



TITIK SAPTAWATI